

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap perangkat daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran. Penyusunan LKjIP merupakan amanat dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan iklim investasi serta penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Seiring dengan dinamika pembangunan daerah dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban dituntut untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan kinerja guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan pelaku usaha.

LKJIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dalam era digitalisasi dan transparansi, LKJIP menjadi semakin penting sebagai media pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban. Laporan ini menyajikan informasi mengenai

pencapaian tujuan dan sasaran strategis, penggunaan sumber daya, serta evaluasi atas kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025.

Melalui penyusunan LKjIP ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan objektif mengenai tingkat keberhasilan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tuban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik pada tahun-tahun mendatang.

1.2. TUGAS, DAN FUNGSI ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 181 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;

- f. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- g. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- h. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta penyusunan program dan laporan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sekretaris membawahi dan mengkoordinasikan:

- a. Subbagian Umum;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
- b. penyelenggaraan urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor;
- c. pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan tugas yang menyangkut hukum dan ketatalaksanaan;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- g. pelaksanaan penyusunan program dan laporan;
- h. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja;

- i. penyelenggaraan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, pembinaan di bidang administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian serta pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah. Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyiapan dan penyediaan bahan penyelenggaraan administrasi umum dan tata usaha, meliputi surat menyurat dan kearsipan;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan perjalanan dinas;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan kepegawaian;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- e. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- f. penyiapan dan penyediaan terkait produk hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris;

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya

Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya terdiri dari Jabatan Fungsional yang menyelenggarakan fungsi sub koordinator perencanaan dan pelaporan serta fungsi sub koordinator administrasi keuangan serta sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

1.2.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal dikoordinasi oleh salah satu Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;

- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.2.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu dikoordinasi oleh salah satu Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;

- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Perangkat Daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan
- h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

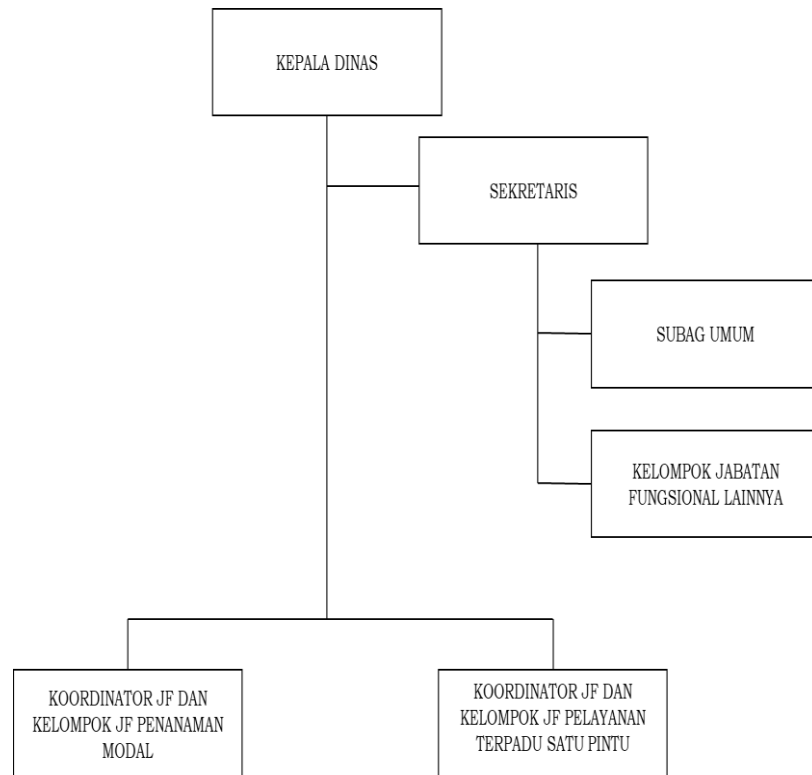
1.2.4. ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 181 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

- 1. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas
- 2. Kepala Dinas membawahi:
 - a. Sekretariat;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya.

Gambar 1.1

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tuban

Berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/199/KPTS/414.012/2022 Tentang Penetapan Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tuban, Peta Jabatan memuat informasi tentang susunan nomenklatur jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah, serta informasi Kelas Jabatan, Persediaan (Bezetting) dan Kebutuhan Pegawai.

1.3. ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Tuban dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Industri hanya tersedia di wilayah utara Kabupaten Tuban;
2. Belum optimalnya peningkatan iklim investasi Kabupaten Tuban disebabkan oleh kurangnya kebijakan investasi, kurangnya kualitas SDM, serta belum tersedianya tim percepatan investasi;
3. Belum optimalnya pemanfaatan potensi investasi pada sektor-sektor unggulan (pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan, dan pariwisata);
4. Sentralisasi perizinan, nonperizinan, dan perizinan berusaha serta pengelolaan data berbasis digital.

1.4. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No 45);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 182);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 194);

17. Peraturan Bupati Tuban Nomor 181 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 16).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Tuban yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tuban. Dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tuban diwujudkan dalam bentuk kebijakan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban.

2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Visi dan misi

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 adalah: “Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan”

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah:

1. Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan utilitas kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta

menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif;

3. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih;
4. Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif.

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Bupati Kabupaten Tuban yaitu “Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan” dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu termasuk dalam Misi ke-2 yakni “Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif”.

Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Tuban dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1.
Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke -				
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tujuan: Meningkatnya nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%
2	Sasaran: Meningkatnya realisasi investasi	Persentase peningkatan realisasi PMA	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%
		Persentase peningkatan reakisasi PMDN	2%	2%	2%	2%	2%

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP, Kab. Tuban 2025

Tujuan dan Sasaran

Dokumen Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025, memuat tentang Informasi Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah Ukuran Kuantitatif dan Kualitatif yang Menggambarkan Tingkat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban. RKT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tuban

No	Kinerja Utama Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (satuan)	Formulasi Perhitungan	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya realisasi investasi	Persentase Peningkatan realisasi PMA	(Jumlah realisasi investasi PMA pada tahun N @dikabupaten - Jumlah realisasi investasi PMA pada tahun N-1 @dikabupaten) / (Jumlah realisasi investasi PMA pada tahun N-1 @dikabupaten) X 100 (%)	3.75 %
		Prsentase Peningkatan realisasi PMDN	Jumlah realisasi investasi PMDN pada tahun N @dikabupaten - Jumlah realisasi investasi PMDN pada tahun (N-1) @dikabupaten) / (Jumlah realisasi investasi PMDN pada tahun N-1 @dikabupaten) X 100 (%)	2 %

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP Kab. Tuban 2025

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban mengacu pada dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 dengan Program dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tuban Tahun 2025

No.		Nama Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1		2	3	4
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	9.059.178.340	APBD
	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.984.143	APBD
		1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	124.990.450	APBD
		2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.993.693	APBD
	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.726.645.000	APBD
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.319.175.340	APBD
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400.345.660	APBD
		3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.450.000	APBD
		4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	4.674.000	APBD
	3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	92.450.000	APBD
		1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26.450.000	APBD
		2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	66.000.000	APBD

	4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	527.994.068	APBD
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000	APBD
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.650.580	APBD
		3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101.988.488	APBD
		4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	92.000.000	APBD
		5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.455.000	APBD
		6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.900.000	APBD
	5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.407.626.500	APBD
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.120.000	APBD
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	618.000.000	APBD
		3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	784.506.500	APBD
	6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.132.478.629	APBD
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.364.810	APBD
		2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	364.747.920	APBD

		3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	567.365.899	APBD
2		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	466.350.000	APBD
	1	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	APBD
		1. Sub Kegiatan Fasilitas Kemitraan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	60.000.000	APBD
	2	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	406.350.000	APBD
		1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/kota	114.000.000	APBD
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	292.350.000	APBD
3		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	540.000.000	APBD
	1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	540.000.000	APBD
		1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	540.000.000	APBD
4		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	327.258.000	APBD
	1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	327.258.000	APBD
		1. Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	73.158.000	APBD

		2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	133.000.000	APBD
		3. Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	121.100.000	APBD
5		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	432.486.800	APBD
	1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	432.486.800	APBD
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	257.249.800	APBD
		2. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	175.237.000	APBD
6		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM PENANAMAN MODAL	195.867.000	APBD
	1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	195.867.000	APBD
		1. Sub Kegiatan Pengolahan ,Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	195.867.000	APBD
JUMLAH			11.021.140.140	APBD

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP, Kab. Tuban 2025

2.1.2 Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Visi dan Misi

Visi Kabupaten Tuban yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan”

Visi ini memiliki dua poin penting dalam proses membangun daerah yaitu pendekatan (*Approach*) dan harapan (*Vision*). Poin pertama yaitu Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, dan Lanjutkan adalah pendekatan pembangunan yang tepat dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Tuban yang diharapkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD, yaitu “Sejahtera”, “Berkeadilan”, “Berbudaya”, dan Berkelanjutan”.

Adapun misi Kabupaten Tuban dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

- **Misi 1** “Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan”.
- **Misi 2** “Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas-Luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif”.
- **Misi 3** “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Bertumpu pada Nilai-nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal”.
- **Misi 4** “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Memperkuat Sistem Pengawasan yang Efektif”.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban berperan dalam mendukung misi kedua. Misi kedua diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “kolaborasi”,

“inovasi”, “karya”, “sejahtera”, “berbudaya”, dan “berkelanjutan”. Peningkatan nilai tambah merupakan kunci dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena melalui peningkatan nilai tambah maka hasil bagi kesejahteraan pemilik usaha ataupun pekerja menjadi lebih besar. Misi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal serta memperkuat daya saing sektor-sektor unggulan. Fokus utama dari misi ini adalah meningkatkan nilai tambah serta pemberdayaan masyarakat agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan. Peningkatan nilai tambah dalam berbagai sektor unggulan merupakan cara yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya industrialisasi berbasis sumber daya lokal, peningkatan daya saing usaha ekonomi, serta penciptaan peluang kerja yang luas, maka perekonomian Kabupaten Tuban dapat tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan misi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi juga memperkuat identitas budaya daerah, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang sama terhadap manfaat pembangunan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban berperan dalam mendukung misi kedua RPJMD, yang mana diturunkan menjadi sebuah Tujuan RPJMD “Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Percepatan Pengentasan Kemiskinan” dengan indikator (1) PDRB per kapita dan (2) Tingkat Kemiskinan. Kemudian dari Tujuan RPJMD tersebut diturunkan menjadi empat Sasaran RPJMD, yang mana Sasaran pertama adalah “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Stabil dan Berkelanjutan” dengan indikator (1) Laju Pertumbuhan Ekonomi, (2) Rasio Gini, dan (3) Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi. Kaitan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban dengan misi kedua RPJMD adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan menjadi perangkat daerah pengampu Tujuan dari misi tersebut dengan indikator PDRB per kapita dan serta pengampu Sasaran

turunannya dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini.

Berdasarkan penurunan dari visi dan misi tersebut, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merumuskan tujuan jangka menengah perangkat daerah, yaitu “Meningkatnya Efektivitas Investasi Daerah”. Tujuan tersebut diukur dengan dua indikator, yaitu (1) ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*), dan (2) PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto).

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penurunan dari tujuan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban, terdapat tiga sasaran jangka menengah, antara lain (1) “Meningkatkan realisasi investasi daerah” dengan indikator Realisasi Investasi (Nilai Realisasi Investasi Tahun N); (2) “Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima” dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah; dan (3) “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan” dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4**Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke -					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tujuan: Meningkatnya Efektivitas Investasi Daerah	ICOR	8,29	7,78	7,75	7,73	7,72	7,7
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	36,63	36,64	36,65	36,66	36,68	36,69
2	Sasaran: Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah	Realisasi Investasi (Rupiah Triliun)	5,3	5,3	5,31	5,32	5,32	5,32
3	Sasaran : Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4,71	4,72	4,73	4,74	4,75	4,76
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	93,02	93,22	93,42	93,62	93,82	94,02

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP, Kab. Tuban 2025

Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan pohon kinerja. Berikut ini disajikan pohon kinerja dan cascading Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban, yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara input, output, *outcome*, dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.

Tujuan dan Sasaran

Dokumen Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban Tahun Anggaran Perubahan 2025, memuat tentang Informasi Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah Ukuran Kuantitatif dan Kualitatif yang Menggambarkan Tingkat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban. RKT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban Tahun Anggaran Perubahan 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tuban

No	Kinerja Utama Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (satuan)	Formulasi Perhitungan	Target Tahun 2025
1	Tujuan : Meningkatnya Efektivitas Investasi Daerah	ICOR	Nilai PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) ADHK Tahun N / (PDRB ADHK Tahun N - PDRB ADHK N-1)	8,29
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	Nilai PMTB PDRB ADHB / Nilai PDRB ADHB X 100%	36,63
1.1	Sasaran : Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah	Realisasi Investasi (Rupiah Triliun)	Nilai Realisasi Investasi Tahun N	5,3
1.2	Sasaran : Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4,71
1.3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	93,02

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP Kab. Tuban 2025

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban mengacu pada dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dengan Program dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban Tahun 2025

No.	Nama Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	7.965.097.453,31	P-APBD
	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.812.769	P-APBD
	1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.113.600	P-APBD
	2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.699.169	P-APBD
	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.877.383.679	P-APBD
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.501.022.079	P-APBD
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	372.269.660	P-APBD
	3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.485.000	P-APBD
	4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	2.607.000	P-APBD
	3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	66.976.000	P-APBD
	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta	976.000	P-APBD

		<i>Atribut Kelengkapannya</i>		
		<i>2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>66.000.000</i>	<i>P-APBD</i>
	4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	377.398.568	P-APBD
		<i>1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>40.000.000</i>	<i>P-APBD</i>
		<i>2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>144.830.080</i>	<i>P-APBD</i>
		<i>3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>98.613.488</i>	<i>P-APBD</i>
		<i>4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>63.500.000</i>	<i>P-APBD</i>
		<i>5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>10.455.000</i>	<i>P-APBD</i>
		<i>6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>20.000.000</i>	<i>P-APBD</i>
	5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.375.185.500	P-APBD
		<i>1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>5.120.000</i>	<i>P-APBD</i>
		<i>2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>604.000.000</i>	<i>P-APBD</i>
		<i>3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>766.065.500</i>	<i>P-APBD</i>
	6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.167.340.877,31	P-APBD
		<i>1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>182.350.810</i>	<i>P-APBD</i>

		2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	386.747.920	P-APBD
		3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	598.242.147,31	P-APBD
2		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	420.515.602,50	P-APBD
	1	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	29.381.602,50	P-APBD
		1. Sub Kegiatan Fasilitas Kemitraan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	29.381.602,50	P-APBD
	2	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	391.134.000	P-APBD
		1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ kota	102.574.000	P-APBD
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	288.560.000	P-APBD
3		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	473.145.000	P-APBD
	1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	473.145.000	P-APBD
		1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	473.145.000	P-APBD
4		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	195.508.456	P-APBD
	1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	195.508.456	P-APBD
		3 Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang	53.528.500	P-APBD

		<i>Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>		
		4 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	72.400.000	P-APBD
		5 Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	69.579.956	P-APBD
5		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	337.413.880	P-APBD
	1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	337.413.880	P-APBD
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	206.436.680	P-APBD
		2. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	130.977.200	P-APBD
6		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM PENANAMAN MODAL	159.604.500	P-APBD
	1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	159.604.500	P-APBD
		1. Sub Kegiatan Pengolahan ,Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	159.604.500	P-APBD
JUMLAH			9.551.256.391,81	P- APBD

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP, Kab. Tuban 2025

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan wujud komitmen nyata serta dokumen kesepakatan formal antara penerima amanah jabatan dengan pemberi amanah untuk mencapai target kinerja yang terukur berdasarkan sumber daya yang tersedia. Dokumen ini menetapkan target kinerja tahunan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis organisasi secara berjenjang.

Pada tahun berjalan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban melakukan penyesuaian dokumen Perjanjian Kinerja sebagai langkah responsif terhadap dinamika organisasi dan transisi perencanaan jangka menengah daerah. Penyesuaian ini krusial untuk menjaga relevansi antara strategi kebijakan dengan perubahan lingkungan strategis yang menuntut adanya tinjauan ulang terhadap target dan anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun.

2.2.1 PK Tahun 2025 (Perencanaan Awal)

Pada awal tahun anggaran 2025, Perjanjian Kinerja (PK) disusun sebagai turunan operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban Periode 2021-2026 serta Rencana Kerja (Renja) tahunan. Dokumen ini menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target sasaran yang bersifat optimistis namun tetap realistis, dengan dukungan alokasi anggaran yang telah disahkan dalam DIPA awal tahun berjalan. Sebagai dokumen rencana aksi, PK Awal ini menjadi dasar utama dalam pelaksanaan kegiatan serta pengendalian penyerapan anggaran, khususnya pada triwulan pertama.

Penyusunan PK pada tahap perencanaan awal ini merefleksikan komitmen keberlanjutan atas arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya. Fokus utama program diarahkan pada optimalisasi pelayanan perizinan dan pencapaian target investasi sesuai dengan target antara (*interim target*) dalam periode perencanaan jangka menengah tersebut, guna menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tuban.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

2.2.2. Review/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sejalan dengan dinamika regulasi dan penetapan periode perencanaan baru di tingkat Kabupaten Tuban, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan *Review* atau Perubahan Perjanjian Kinerja sebagai tindak lanjut atas pemberlakuan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Perubahan ini dilakukan untuk menyelaraskan target kinerja perangkat daerah dengan visi, misi, dan arah kebijakan baru Kabupaten Tuban. Proses *review* ini memastikan bahwa indikator kinerja yang ditetapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu merespons tuntutan transformasi digital dan peningkatan daya saing investasi di Kabupaten Tuban secara lebih efektif.

Review atau Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan sebagai bentuk adaptasi terhadap pemberlakuan **Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029**. Proses transisi ini mengharuskan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban untuk melakukan penyelarasan ulang terhadap indikator kinerja agar sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah periode terbaru. Melalui mekanisme *review* ini, dilakukan penajaman sasaran strategis agar lebih relevan dengan tuntutan transformasi pelayanan publik dan akselerasi investasi yang lebih modern dan akuntabel.

Adapun *review* atau Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

2.2.3. Ringkasan Perubahan PK Tahun 2025

Ringkasan perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tuban menyajikan komparasi mendalam antara perencanaan awal yang berbasis Renstra 2021-2026 dengan hasil tinjauan ulang yang merujuk pada Renstra 2025-2029. Perubahan ini

merupakan wujud sinkronisasi kebijakan untuk memastikan target organisasi tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah yang baru.

Berdasarkan hasil review, perubahan substansial terjadi pada struktur sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Penajaman Sasaran Investasi : Sasaran awal "Meningkatnya Realisasi Investasi" dengan indikator "Persentase Peningkatan Realisasi PMA" mengalami transformasi menjadi "Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah" dengan indikator yang lebih inklusif, yaitu "Realisasi Investasi". Hal ini menunjukkan pergeseran fokus dari sekadar persentase pertumbuhan spesifik menjadi pencapaian nilai realisasi investasi yang lebih komprehensif di daerah.
2. Penambahan Sasaran Kualitas Pelayanan : Dalam dokumen perubahan, muncul sasaran strategis baru yang belum termuat pada perencanaan awal, yaitu "Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima" dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah. Penambahan ini menegaskan komitmen Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan standar mutu pelayanan secara sistematis.
3. Penguatan Orientasi Masyarakat : Terdapat penambahan sasaran "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan" melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah. Hal ini mencerminkan upaya dinas untuk menjadikan umpan balik masyarakat sebagai tolok ukur utama keberhasilan layanan.

Secara keseluruhan, perubahan ini menunjukkan adanya eskalasi target dan penajaman indikator dari yang sebelumnya hanya fokus pada satu aspek investasi, kini meluas menjadi tiga fokus utama yang mencakup aspek investasi, kualitas pelayanan publik, dan kepuasan masyarakat. Detail perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Ringkasan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tuban

PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026)			REVIEW/PERUBAHAN PK (Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029)			KETERANGAN (diisi indikator tetap, berubah, dihapus, atau ditambahkan)
No	Sasaran	Indikator	No	Sasaran	Indikator	
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Persentase peningkatan realisasi PMA	1	Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah	Realisasi Investasi	Berubah (Penajaman Sasaran & Indikator)
		Persentase peningkatan realisasi PMA	2	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Ditambahkan (Indikator Baru)
			3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Ditambahkan (Indikator Baru)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Bagian ini menyajikan hasil pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tuban sebagai perwujudan akuntabilitas atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan program kerja selama tahun 2025. Pengukuran kinerja ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahun 2025 dilaksanakan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Pedoman tersebut menitikberatkan pada pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi melalui analisis yang mendalam. Dalam mengukur serta mengevaluasi capaian kinerja, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban menggunakan lima tolok ukur utama sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan organisasi lain yang setipe/provinsi/Nasional. (Benchmark Kinerja).
5. Analisis kualitas capaian kinerja sasaran strategis.

A. Capaian Kinerja Tahun 2025 (berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Perencanaan awal/sebelum perubahan))

Sebelum dilakukannya perubahan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban telah melaksanakan serangkaian program kerja berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Perencanaan Awal/Renstra 2021-2026). Berikut adalah ringkasan capaian kinerja dan realisasi anggaran hingga Triwulan III (TW-3) tahun 2025 :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tuban

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (sampai dengan TW-3)	Program/ Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan
Meningkatnya Realisasi Investasi	Persentase peningkatan realisasi PMA	3,75 %	11.021.140.140	Ditarget pada Tw 4	Ditarget pada Tw 4		
	Persentase peningkatan realisasi PMA	2 %					

Meningkatnya Iklim Penanaman Modal Terfasilitasinya pelaku usaha dalam memperoleh insentif atau kemudahan Penanaman Modal investasi	Jumlah bahan rumusan kebijakan Penanaman Modal (SK, perbup, Perda)	100 %	466.350.000	Ditarget pada Tw 4	Ditarget pada Tw 4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	• Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Besar dan UMKM • Penyusunan Dokumen RUPM • Penyusunan Dokumen IPRO dan Peta Potensi • Matchmaking Antar Pelaku Usaha
Sasaran Kegiatan: Terlaksananya kebijakan kemudahan penanaman modal	Jumlah Kebijakan kemudahan penanaman modal	2 Doku men	60.000.000	Ditarget pada Tw 4	Ditarget pada Tw 4	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	• Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Besar dan UMKM

Sasaran Kegiatan : Tersedianya peta potensi penanaman modal sesuai dengan standar	Jumlah peta potensi penanaman modal	2 Dokumen	406.350.000	Ditarget pada Tw 4	Ditarget pada Tw 4	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	• Penyusunan Dokumen RUPM • Penyusunan Dokumen IPRO dan Peta Potensi • Matchmaking Antar Pelaku Usaha
Meningkatnya Efektifitas Promosi Penanaman Modal	Persentase calon investor yang merealisasikan penanaman modal	10 %	540.000.000	0 %	0 %	Program Promosi Penanaman Modal	• Pameran Promosi Investasi • Tuban Investment Forum • Webinar • Dialogue Investasi
Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Promosi Penanaman Modal	Jumlah Calon Investor	20 Pelaku Usaha	540.000.000	0 %	0 Pelaku Usaha	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	• Pameran Promosi Investasi • Tuban Investment Forum • Webinar • Dialogue Investasi

Meningkatnya Pengendalian Penanaman Modal	Cakupan pengendalian pelaku usaha (%)	45 %	327.258.000	88,8%	40 %	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	• Jempol Ananda • Bimtek LKPM • Klimik Investasi • Pengawasan Perizinan Berusaha • Penyelesaian Hambatan Penanaman Modal • Sosialisasi Penanaman Modal
Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	220 Pelaku Usaha	327.258.000	74,09 %	163 Pelaku Usaha	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	• Jempol Ananda • Bimtek LKPM • Klimik Investasi • Pengawasan Perizinan Berusaha • Penyelesaian Hambatan Penanaman Modal • Sosialisasi Penanaman Modal
Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase jumlah perizinan dan non perizinan yang	100 %	432.486.800	97,25 %	97,25 %	Program Pelayanan Penanaman Modal	• Sosialisasi • Jempol Lari • Roadshow Pelayanan Publik

	diterbitkan telah sesuai ketentuan teknis dan SOP						• Pemantauan pemenuhan komitmen
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani secara elektronik	76 %	432.486.800	127,60%	96.98%	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	• Sosialisasi • Jempol Lari • Roadshow Pelayanan Publik • Pemantauan pemenuhan komitmen
Meningkatnya pengelolaan data dan informasi investasi	Persentase jumlah pemohon ijin atau calon investor yang memanfaatkan	93 %	195.867.000	101,70%	94,59 %	Program Pengelolaan Data Dan Sistem	• Rekapitulasi data perizinan dan non perizinan • Penyusunan SP dan SOP

	data dan sistem informasi penanaman modal					Informasi Penanaman Modal	perizinan dan non perizinan
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya integrasi data dan informasi perizinan dan nonperizinan	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terdata di sistem elektronik terintegrasi	76 %	195.867.000	127,96%	97,25 %	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	• Rekapitulasi data perizinan dan non perizinan • Penyusunan SP dan SOP perizinan dan non perizinan
Meningkatnya nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	84.3 Point	9.059.178.340	Ditarget pada Tw 4	Ditarget pada Tw 4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban	• Gaji Tunjangan dan TPP ASN • Rutin Penunjang lainnya • Penyusunan Dokumen Perencanaan • Penyusunan Laporan Evaluasi kinerja perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi yang tersusun	9 Doku men	149.984.143	8 Dokumen	8 Dokumen	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	• Penyusunan Dokumen Perencanaa • Penyusunan Laporan Evaluasi kinerja perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Doku men	5.726.645.000	9 Dokumen	9 Dokumen	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	• Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan • Gaji Tunjangan dan TPP ASN
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	2 Layanan	92.450.000	2 Layanan	2 Layanan	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	• Administrasi Kepegawaian

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	6 Jenis Layanan	527.994.068	6 Jenis Layanan	6 Jenis Layanan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	• Pengadaan Administrasi Umum
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas pengadaan jasa penunjang	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	3 Jenis Jasa	1.407.626.500	3 Jenis Jasa	3 Jenis Jasa	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	• Pengadaan Jasa Penunjang
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Jenis Barang	1.132.478.629	3 Jenis Barang	3 Jenis Barang	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	• Pemeliharaan Barang Milik Daerah

B. Capaian Atas Review/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban tahun 2025 merupakan perwujudan dari tujuan strategis instansi yaitu "Meningkatnya Efektivitas Investasi Daerah". Efektivitas investasi ini menjadi parameter krusial untuk mengukur sejauh mana investasi yang tertanam di Kabupaten Tuban mampu memberikan dampak nyata terhadap output perekonomian daerah.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2025, efektivitas investasi diukur melalui dua indikator utama, yaitu Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Tujuan

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian %
1	Tujuan: Meningkatnya Efektivitas Investasi Daerah	ICOR	Nilai PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) ADHK Tahun N / (PDRB ADHK Tahun N - PDRB ADHK N-1)	8,29	BPS belum rilis	
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	Nilai PMTB PDRB ADHB / Nilai PDRB ADHB X 100%	36,63	BPS belum rilis	

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, berikut adalah analisis mendalam mengenai capaian kinerja tujuan pada tahun berjalan:

1. Indikator ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Target yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah sebesar 8,29. Angka ini merepresentasikan tingkat efisiensi penggunaan modal di Kabupaten Tuban, di mana angka yang semakin kecil menunjukkan efisiensi yang semakin tinggi. Indikator ini dihitung dengan formulasi:

$$ICOR = \frac{\text{Nilai PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) ADHK Tahun N}}{(\text{PDRB ADHK Tahun N} - \text{PDRB ADHK N-1})} \times 100\%$$

Hingga laporan ini disusun, realisasi angka ICOR belum dapat dihitung secara final. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan data pada penyedia data statistik sektoral nasional, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), di mana data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dan data PMTB tahun berjalan baru akan dirilis pada bulan April 2025. maka dapat kita lihat hasilnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{..... (n)}}{\text{..... (n) - 87.110,99 (n-1)}} \times 100\% = \text{.....}$$

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa ICOR pada Tahun 2025 sebesar sedangkan Target ICOR yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2029 adalah sebesar 8,29; sehingga capaian kinerja Peningkatan Nilai Investasi dikabupaten Tuban pada Tahun 2025 sebesar

2. Indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (%) Indikator ini mengukur besarnya kontribusi investasi fisik (seperti pembangunan infrastruktur, mesin, dan peralatan) terhadap total nilai ekonomi (PDRB) Kabupaten Tuban, dengan target sebesar 36,63%. Indikator ini dihitung dengan formulasi:

$$PMTB = \frac{\text{Nilai PMTB PDRB ADHB}}{\text{Nilai PDRB ADHB}} \times 100\%$$

Sama halnya dengan ICOR, realisasi PMTB tahun 2025 juga berstatus menunggu rilis data resmi dari BPS. Meskipun realisasi

secara administratif (izin masuk dan komitmen investasi) menunjukkan tren positif, angka makro ekonomi yang mencerminkan investasi yang telah menjadi aset tetap (PMTB) masih memerlukan validasi data statistik nasional.

$$\frac{\text{..... (n)}}{\text{..... (n)}} \times 100\% = \text{.....}$$

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa PMTB pada Tahun 2025 sebesar sedangkan Target PMTB yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2029 adalah sebesar 36,63, sehingga capaian kinerja Peningkatan Nilai Investasi dikabupaten Tuban pada Tahun 2025 sebesar

Faktor Pendukung dan Penghambat:

- **Faktor Penghambat:** Adanya time lag (jeda waktu) dalam publikasi data makro ekonomi oleh BPS Pusat/Provinsi menyebabkan pelaporan realisasi kinerja pada saat LKjIP disusun belum dapat menyajikan angka mutakhir.
- **Upaya yang Dilakukan:** Untuk memastikan efektivitas investasi tetap terjaga, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban terus melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek strategis di wilayah Tuban agar komitmen investasi segera terealisasi menjadi aset produktif (PMTB) yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

3.2. Pencapaian Kinerja Sasaran

Pencapaian kinerja sasaran merupakan wujud nyata dari pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban dalam mencapai visi dan misi daerah. Pada tahun 2025, melalui Perubahan Perjanjian Kinerja yang merujuk pada Renstra 2025-2029, terdapat penambahan 2 (dua) sasaran strategis baru yang berfokus pada kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat.

Berikut adalah ringkasan pencapaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban Tahun 2025:

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Sasaran : Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah	Realisasi Investasi (Rupiah Triliun)	5,3	1.8	33,96%
2.	Sasaran : Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4,71	4,85 (A)	102,97%
3.	Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	92,82	93,11	100,31%

Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran

1. Sasaran: Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah Indikator Realisasi Investasi pada tahun 2025 mencatatkan angka sebesar Rp. 1,8 Triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 5,3 Triliun, atau mencapai 33,96%.

- **Faktor Pendukung:** Keberhasilan perolehan angka Rp. 1,8 Triliun ini didorong oleh terjaganya stabilitas iklim usaha di Kabupaten Tuban pasca-transisi kebijakan investasi, yang memberikan rasa aman bagi pelaku usaha yang sudah eksis.
- **Analisis Ketidaktercapaian:** Rendahnya capaian persentase dari target (33,96%) disebabkan oleh beberapa kendala struktural, antara lain:

1. Sebagian besar pelaku usaha eksisting belum melakukan ekspansi (pengembangan dan perluasan usaha), sehingga tidak ada penambahan nilai investasi baru yang signifikan.
2. Beberapa calon investor potensial yang telah menanamkan modalnya secara administratif masih dalam tahap persiapan dan belum memulai kegiatan konstruksi atau operasional (kegiatan usaha), sehingga nilai investasinya belum dapat tercatat sebagai realisasi Investasi.

2. Sasaran: Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima

Indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) menunjukkan performa yang sangat baik dengan capaian **4,85 (Kategori A)** dari target **4,71**, atau mencapai **102,97%**.

- **Analisis Keberhasilan:** Kinerja melampaui target ini merupakan hasil dari langkah masif Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melakukan pembenahan sistem **digitalisasi perizinan**. Integrasi sistem yang lebih *user-friendly* dan efisiensi birokrasi melalui OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) menjadi kunci utama peningkatan kualitas layanan di Kabupaten Tuban.

3. Sasaran: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai angka 93,11 dari target 92,82, atau mencapai 100,31%.

- **Analisis Keberhasilan:** Keberhasilan dalam mempertahankan dan meningkatkan kepuasan masyarakat didorong oleh efektivitas fungsi helpdesk. Respon cepat terhadap keluhan pemohon serta penyediaan kanal konsultasi yang solutif memberikan rasa puas bagi para pelaku usaha dan masyarakat dalam mengakses layanan perizinan dan non-perizinan.

Tabel 3.4
DATA REALISASI INVESTASI PMA & PMDN KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025 BERDASARKAN NSWI

No	Tahun	Jenis Investasi	Jumlah Investor	Jumlah Proyek	Jumlah Tenaga Kerja		Realisasi Investasi
					TKI	TKA	
1	TW I	PMA	15	60	73	-	164.778.525.706
		PMDN	107	437	299	-	109.748.947.384
	TOTAL		122	497	372	-	274.527.473.090
2	TW II	PMA	16	45	173	-	149.068.045.451
		PMDN	240	1.389	782	-	387.045.333.072
	TOTAL		256	430	955	-	536.113.378.523
3	TW III	PMA	17	70	952	-	202.194.990.758
		PMDN	130	482	250	-	250.723.888.494
	TOTAL		147	552	842	-	452.918.879.252
4	TW IV	PMA	16	59	54	-	98.951.282.848
		PMDN	100	407	933	-	390.378.266.807
	TOTAL		116	466	987	-	489.329.549.655
Total PMA			64	234	892		614.992.844.763
Total PMDN			577	2.670	2.264	-	1.137.896.435.757
GRAND TOTAL			641	2.904	3.156	-	1.752.889.280.520

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Program/ kegiatan/ Sub kegiatan
Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan / Subkrgiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi	100 %	33,96 %	33,96 %
1.1	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Kebijakan kemudahan penanaman modal	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %

1.1.1	Subkegiatan Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
1.2	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi penanaman modal	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
1.2.1	Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
1.2.2	Subkegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten/ kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Calon Investor yang Menanamkan Modal	10 %	10 %	100 %
2.1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Calon Investor	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	100 %
2.1.1	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/ kota	5 Dokumen	9 Dokumen	180 %
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	100 %

3.1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani secara elektronik	76 %	96.98 %	127 %
3.1.1	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	450 Pelaku Usaha	3.930 Pelaku Usaha	873 %
3.1.2	Subkegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/ kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	140 Kegiatan Usaha	140 Kegiatan Usaha	96.42 %
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampai kan LKPM Sesuai Ketentuan	60 %	63,64 %	106,06%

4.1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	220 Pelaku Usaha	324 Pelaku Usaha	147,27%
4.1.1	Subkegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahnya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasi kegiatan usahanya	8 Kegiatan Usaha	8 Kegiatan Usaha	100 %
4.1.2	Subkegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	400 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha	100 %
4.1.3	Subkegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku inspeksi lapangan terhadap kegiatan serta dilakukan evaluasi	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	100 %

		penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha			
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi peizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan yang dikelola dan dimanfaatkan	93 %	93.47 %	100,50%
5.1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terdata di sistem elektronik terintegrasi	76 %	96.98 %	127,60%
5.1.1	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji, dan dimanfaatkan	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	84.30	84.25	99.94 %
6.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi yang tersusun	9 Dokumen	9 Dokumen	100 %

6.1.1	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
6.1.2	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %
6.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Dokumen	9 Dokumen	100 %
6.2.1	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/ Bulan	36 Orang/ Bulan	100 %
6.2.2	Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
6.2.3	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	100 %
6.2.4	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	23 Laporan	23 Laporan	100 %

		Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
6.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	2 Layanan	2 Layanan	100 %
6.3.1	Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100 %
6.3.2	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 Orang	50 Orang	100 %
6.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	6 Jenis Layanan	6 Jenis Layanan	100 %
6.4.1	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100 %
6.4.2	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan an Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100 %
6.4.3	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100 %

6.4.4	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100 %
6.4.5	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %
6.4.6	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	9 Laporan	180 %
6.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	3 Jenis Jasa	3 Jenis Jasa	100 %
6.5.1	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100 %
6.5.2	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100 %
6.5.3	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100 %
6.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Jenis Barang	3 Jenis Barang	100 %

6.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	29 Unit	100 %
6.6.2	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	211 Unit	211 Unit	100 %
6.6.3	Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100 %

Berdasarkan data yang Anda lampirkan dalam tabel Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025, berikut adalah analisis mendalam mengenai capaian kinerja pada tingkat Program, Kegiatan, hingga Subkegiatan:

Analisis Per Level Kinerja

1. Program: Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- **Indikator:** Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi.
- **Capaian: 33,96%** (Realisasi 33,96% dari Target 100%).
- **Analisis:** Terdapat kesenjangan (*gap*) yang signifikan antara target yang ditetapkan (100%) dengan realisasi yang tercapai (33,96%). Angka ini diperoleh dari perbandingan realisasi investasi sebesar Rp. 1,8 Triliun terhadap target sebesar Rp. 5,3 Triliun dikalikan 100%.

Rendahnya tingkat ketercapaian ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan dan fasilitasi secara administratif telah dilaksanakan, dampak riilnya terhadap peningkatan aliran modal ke daerah belum optimal. Berdasarkan identifikasi di lapangan, penyebab utama rendahnya realisasi investasi ini adalah:

- **Stagnasi Pengembangan Usaha:** Mayoritas pelaku usaha belum melakukan pengembangan atau perluasan usaha, sehingga nilai investasi tidak mengalami penambahan yang signifikan.

- **Penundaan Operasional:** Terdapat sejumlah calon investor yang telah menanamkan modalnya, namun belum memulai kegiatan operasional atau konstruksi secara nyata di daerah.

1.1. Kegiatan: Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif

- **Indikator:** Jumlah Kebijakan kemudahan penanaman modal.
- **Capaian: 100%** (Realisasi 2 dari target 2 Dokumen).
- **Analisis:** Secara manajerial, instansi telah berhasil menyelesaikan aspek regulasi. Dua dokumen kebijakan yaitu Perda insentif ada pada Perda No 7 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi telah diterbitkan tepat waktu. Serta Raperbup RUPM Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan payung hukum untuk menarik investor.

1.1.1. Subkegiatan: Fasilitas Kemitraan

- **Indikator:** Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM.
- **Capaian: 100%** (Realisasi 2 dari target 2 Dokumen).
- **Analisis:** Target administratif untuk memfasilitasi kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM telah tercapai sepenuhnya (100%). Keberhasilan ini dibuktikan dengan terealisasinya 2 (dua) dokumen kesepakatan kemitraan strategis, yaitu:

1. Sektor Logistik: Kerjasama antara PT Solusi Bangun Indonesia dengan Yayasan Pusat Kegiatan Desa Karangasem (Jenu) dalam pengadaan seragam karyawan serta penyediaan konsumsi rapat dan kegiatan.

2. Sektor Konstruksi: Kerjasama antara PT Industri Kemasan Semen Gresik dengan PT Turangga Jaya Sakti.

Tercapainya target ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi pemerintah daerah dalam membangun ekosistem investasi yang inklusif telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Sinergi ini diharapkan dapat mendorong pemberdayaan pelaku usaha lokal melalui rantai pasok industri besar.

1.2. Kegiatan: Pembuatan Peta Potensi Investasi

- **Indikator:** Jumlah peta potensi penanaman modal.
- **Capaian: 100%** (Realisasi 2 dari target 2 Dokumen).

- **Analisis:** Realisasi indikator ini menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menyediakan basis data spasial yang komprehensif bagi calon investor. Keberhasilan penyelesaian 2 (dua) dokumen strategis, yaitu:

1. Peta Potensi Investasi Sektor Peternakan: Fokus pada pengolahan sapi pedaging.
2. Investment Project Ready to Offer (IPRO): Fokus pada industri pengolahan bijih plastik (*Polyethylene Terephthalate*/PET).

Tersusunnya kedua dokumen tersebut menjadi modal penting bagi daerah dalam menjalankan strategi pemasaran investasi yang lebih terukur, kompetitif, dan berbasis data (*data-driven*). Ketersediaan peta potensi ini diharapkan dapat mempermudah calon investor dalam mengambil keputusan investasi berdasarkan profil peluang yang siap ditawarkan.

1.2.1. Subkegiatan: Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)

- **Indikator:** Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota.
- **Capaian: 100%** (1 dari 1 Dokumen).
- **Analisis:** Capaian 100% pada subkegiatan ini ditandai dengan terselesaikannya tahapan krusial dalam pembentukan regulasi daerah. Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tuban telah berhasil menuntaskan penyusunan Naskah Akademik RUPM Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 sebagai landasan utama untuk pengusulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada tahun 2026. Penyelesaian dokumen ini menandakan bahwa daerah telah memiliki arah kebijakan jangka panjang yang strategis dan terukur dalam urusan penanaman modal untuk dua dekade ke depan. Mengingat penyusunan sebuah Perda memerlukan proses teknis dan legislasi yang kompleks, keberhasilan pencapaian target ini mencerminkan koordinasi yang efektif antara pihak eksekutif, tim ahli, serta instansi terkait dalam memenuhi prasyarat legalitas yang ditetapkan.

1.2.2. Subkegiatan: Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

- **Indikator:** Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten/kota
- **Capaian: 100%** (Realisasi 2 dari Target 2 Dokumen).
- **Analisis:** Realisasi indikator ini menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menyediakan basis data spasial yang komprehensif bagi calon investor. Keberhasilan penyelesaian 2 (dua) dokumen strategis, yaitu:
 1. Peta Potensi Investasi Sektor Peternakan: Fokus pada pengolahan sapi pedaging.
 2. *Investment Project Ready to Offer* (IPRO): Fokus pada industri pengolahan bijih plastik (*Polyethylene Terephthalate*/PET).

Tersusunnya kedua dokumen tersebut menjadi modal penting bagi daerah dalam menjalankan strategi pemasaran investasi yang lebih terukur, kompetitif, dan berbasis data (*data-driven*). Ketersediaan peta potensi ini diharapkan dapat mempermudah calon investor dalam mengambil keputusan investasi berdasarkan profil peluang yang siap ditawarkan.

2. Program: Promosi Penanaman Modal

- **Indikator:** Persentase Calon Investor yang Menanamkan Modal.
- **Capaian: 100%** (Realisasi 10% dari Target 10%).
- **Analisis:** Capaian indikator ini menunjukkan bahwa program promosi penanaman modal berhasil menjaga kualitas strategi pemasaran sehingga rasio konversi antara "minat" menjadi "realisasi" berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Rasio sebesar 10% merupakan angka yang kompetitif dalam proses *lead conversion* di sektor investasi, yang mengindikasikan bahwa upaya promosi dan pendampingan dilakukan secara tepat sasaran.

Pada tahun 2025, tercatat 10 (sepuluh) calon investor potensial dari berbagai latar belakang industri dan negara yang masuk dalam radar promosi, di antaranya:

1. PT Hansa Pratama (PMA) – Industri Manufaktur
2. PT China State (PMA) – Industri Manufaktur
3. PT Unichem Indonesia (PMDN) – Industri Garam
4. PT Wastec International (PMA) – Industri Pengolahan Limbah

5. PT Singapore Enterprise (PMA) – Asosiasi Bisnis Singapura
6. China Eight Engineering (PMA) – Konstruksi
7. Thailand Board of Investment (PMA) – Asosiasi Bisnis Thailand
8. Korea Trade Investment (PMA) – Asosiasi Bisnis Korea Selatan
9. PT Mitsui Indonesia (PMDN) – Industri Manufaktur
10. Shancorp Holding PTE LTD (PMA) – Asosiasi Bisnis Taiwan

Dari daftar tersebut, PT Wastec International (PMA) telah secara resmi berkomitmen untuk merealisasikan investasinya di Kabupaten Tuban. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi penganggaran dan fasilitasi, di mana selain menggunakan APBD, kegiatan promosi juga mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Investasi/BKPM, Bank Indonesia, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sinergi lintas lembaga ini terbukti efektif dalam memperkuat fungsi fasilitasi guna menarik modal asing dan memperkokoh struktur industri di daerah.

2.1 Kegiatan: Penyelenggaraan Promosi

- **Indikator:** Jumlah Calon Investor.
- **Capaian:** 100% (Realisasi 20 dari Target 20 Pelaku Usaha).
- **Analisis:** Instansi telah berhasil menjaring **20 calon investor potensial** sepanjang tahun 2025. Pencapaian target 100% ini merefleksikan efektivitas strategi tim dalam membangun jejaring bisnis serta memperkuat daya tarik potensi daerah di mata pelaku usaha, baik skala nasional maupun internasional.

Melalui kegiatan Pameran Promosi Investasi di Kabupaten Tuban, berikut adalah daftar pelaku usaha yang terjaring:

Tabel 3.6
Calon Investor Potensial
Tahun 2025

No.	Nama Pelaku Usaha	No.	Nama Pelaku Usaha
1	PT Hansa Pratama	11	PT. Swadaya Graha
2	PT Wastec Internasional	12	PT. Edwag Mitra Sukses
3	PT Mitsui Indonesia	13	PT. Bion Inovasi General
4	PT Unichem Indonesia	14	PT. Non Ferindo Utama
5	PT China State Construction	15	PT. Sinar Indah Perkasa

6	PT Singapore Enterprise	16	PT. Cipta Niaga Semesta
7	PT China Eight Engineering	17	Switzerland Global Enterprise
8	Thailand Board of Investment	18	IBAC (Internasional Business Association)
9	Korea Trade Investment	19	Envision Group
10	Shancorp Holding Pte Ltd	20	PT. Adi Graha Wira

2.1.1 Subkegiatan: Pelaksanaan Kegiatan Promosi

- **Indikator:** Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi.
- **Capaian: 180%** (Realisasi 9 dari Target 5 Dokumen).
- **Analisis:** Subkegiatan ini menunjukkan performa yang sangat progresif dengan capaian melampaui target (*over-achievement*) sebesar 180%. Penambahan 4 (empat) dokumen hasil promosi dari target awal menunjukkan tingginya intensitas aktivitas pemasaran investasi dan partisipasi daerah dalam berbagai forum strategis sepanjang tahun 2025. Realisasi 9 (sembilan) dokumen tersebut merupakan hasil dari rangkaian kegiatan promosi nasional dan daerah, yaitu:
 1. Inacraft (Jakarta)
 2. Trade Expo Indonesia / TEI (Tangerang)
 3. Tuban Expo
 4. Bandung Trade Investment
 5. East Java Investment Forum (EJIF)
 6. East Java Investment Dialogue (EJID)
 7. Forum Investasi Nasional (Bandung)
 8. Roadshow Pelayanan Perizinan (Kabupaten Tuban)
 9. Tuban Investment Forum (TUBIF)

Melampauinya target ini membuktikan bahwa pemerintah daerah sangat aktif dalam menjemput bola untuk memperkenalkan peluang investasi. Dokumentasi yang dihasilkan dari forum-forum tersebut memberikan basis data yang lebih detail dan komprehensif mengenai profil investasi daerah, yang sangat krusial untuk menarik minat calon investor di masa mendatang

3. Program: Pelayanan Penanaman Modal

- **Indikator:** Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan.

- **Capaian:** 100% (Realisasi 100% dari Target 100%)
- **Analisis:** Capaian indikator ini menunjukkan tingkat kepuasan dan kepatuhan hukum yang maksimal dalam pelayanan perizinan. Seluruh pelaku usaha yang mengajukan permohonan telah mendapatkan legalitas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini mencerminkan adanya kepastian hukum yang sangat baik di Kabupaten Tuban, yang menjadi fondasi penting bagi iklim investasi yang sehat. Secara teknis, tingkat ketercapaian sempurna (100%) ini diperoleh dari total 12.297 pelaku usaha yang berhasil memperoleh izin dari keseluruhan 12.297 berkas permohonan yang masuk sepanjang periode pelaporan. Keberhasilan dalam memproses seluruh permohonan secara akurat sesuai ketentuan menunjukkan bahwa sistem pelayanan perizinan telah berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Dimana jumlah izin dan realisasi retribusi perizinan dan non perizinan di Kabupaten Tuban Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Jumlah Penerbitan Izin dan Realisasi Retribusi
Perizinan dan Non Perizinan

No	Jenis Izin	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Retribusi
1	Persetujuan Bangunan Gedung (Pbg)	97	-
2	Izin Reklame	59	-
3	PKKPR Non Berusaha	141	-
4	SITE PLAN	10	-
5	Rekomendasi Zona Menara	3	-
6	Rekomendasi Andalalin	2	-
7	Rekomendasi IUTM	1	-
8	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	-	-
9	Proposal MBR	6	-
10	Izin Trayek	-	-
11	Penurunan Trotoar	11	-
12	SIP TENAGA KESEHATAN		
	SIP Perawat	-	-
	SIP Bidan	-	-

	SIP Dokter	-	-
	SIP Dokter Spesialis	1	-
	SIP Dokter Gigi	-	-
	Dokter Internship	21	-
	SIP Fisikawan Medis	-	-
	Pencabutan S I P	100	-
	MPP Digital	1.162	-
13	SIP Dokter Hewan	3	-
14	P-IRT	429	-
15	Izin Penelitian	752	-
16	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	19	-
17	OSS (NIB)	9.480	-
	TOTAL	12.297	-

3.1 Kegiatan: Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- **Indikator:** Persentase pelayanan perizinan yang dilayani secara elektronik.
- **Capaian:** 127% (Realisasi 96,98% dari target 76%)
- **Analisis:** Realisasi indikator ini menunjukkan terjadinya percepatan digitalisasi pelayanan yang sangat signifikan. Dari target moderat sebesar 76%, capaian riil berhasil menyentuh angka 96,98%, yang membuktikan bahwa sistem perizinan daring (*online*) telah diadopsi dengan sangat baik oleh masyarakat dan didukung oleh infrastruktur digital internal yang optimal.

Secara teknis, angka tersebut diperoleh dari total 11.926 permohonan perizinan dan non-perizinan yang diproses secara elektronik dari keseluruhan 12.297 permohonan yang masuk. Lonjakan persentase ini merupakan hasil dari langkah strategis sepanjang tahun 2025, di mana dilakukan pemutakhiran prosedur dan integrasi berbagai jenis layanan ke dalam platform elektronik. Peningkatan pesat ini tidak hanya mencerminkan efisiensi birokrasi, tetapi juga menunjukkan komitmen daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang transparan dan akuntabel.

3.1.1 Subkegiatan: Pelayanan Perizinan OSS-RBA

- **Indikator:** Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem elektronik.
- **Capaian :** 873% (Realisasi 3.930 dari Target 450 Pelaku Usaha)
- **Analisis:** Indikator ini mencatatkan capaian kinerja yang sangat signifikan, dengan realisasi mencapai hampir sembilan kali lipat dari target yang ditetapkan. Lonjakan angka sebesar 3.930 pelaku usaha ini merupakan bukti nyata keberhasilan masif dalam sosialisasi legalitas usaha, khususnya penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Keberhasilan ini didorong oleh dua faktor strategis utama:

1. Efektivitas Sistem OSS-RBA: Platform perizinan berusaha berbasis risiko telah berhasil menjangkau pelaku usaha hingga ke level akar rumput secara inklusif.
2. Strategi Jemput Bola: Akselerasi pencapaian target ini merupakan hasil dari pelayanan proaktif melalui kegiatan pelayanan keliling atau *mobile service*, yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mengurus legalitas usaha secara langsung di lokasi mereka.

Capaian yang melampaui target secara eksponensial ini mencerminkan tingginya kesadaran pelaku usaha di daerah terhadap pentingnya legalitas, sekaligus menunjukkan efisiensi birokrasi dalam memfasilitasi kebutuhan perizinan masyarakat secara menyeluruh.

4. Program: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- **Indikator:** Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM Sesuai Ketentuan.
- **Capaian: 106,06%** (Realisasi 63,64% dari Target 60%).
- **Analisis:** Realisasi program ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dengan tingkat ketercapaian sebesar 106,06%. Capaian riil sebesar 63,64% tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha telah memiliki kesadaran hukum yang baik dalam melaporkan perkembangan kegiatan usahanya secara rutin dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara teknis, angka ini diperoleh dari hasil perbandingan antara 49 pelaku usaha yang menyampaikan Laporan Kegiatan

Penanaman Modal (LKPM) sesuai ketentuan terhadap total 77 pelaku usaha kategori Non-UMKM. Keberhasilan pelaporan ini mencerminkan efektivitas fungsi pengawasan, pengendalian, dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan periodik. Hal ini sangat penting guna menghasilkan data perkembangan investasi daerah yang akurat dan akuntabel.

4.1 Kegiatan: Pengendalian Pelaksanaan

- **Indikator:** Jumlah pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).
- **Capaian:** 147,27% (Realisasi 324 dari Target 220 Pelaku Usaha)
- **Analisis:** Kegiatan pengendalian mencatatkan pelampauan target yang sangat signifikan secara kuantitas, dengan tingkat ketercapaian mencapai 147,27%. Adanya tambahan sebanyak 104 pelaku usaha yang melaporkan kegiatannya di luar target awal menjadi indikator kuat bahwa strategi pengawasan di lapangan telah berjalan secara efektif.

Keberhasilan ini didorong oleh beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Optimalisasi Sosialisasi: Meningkatnya pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban pelaporan periodik.
2. Sistem Peringatan Dini (*Early Warning*): Pemberian pengingat secara intensif kepada pelaku usaha sebelum batas waktu pelaporan berakhir.
3. Layanan Jemput Bola: Pendampingan langsung secara proaktif oleh tim pengawas untuk membantu pelaku usaha yang mengalami kendala teknis dalam pengisian LKPM.

Tingginya realisasi ini membuktikan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi penanaman modal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap ketersediaan data realisasi investasi daerah yang lebih akurat dan menyeluruh

4.1.1 Subkegiatan: Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan

- **Indikator:** Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha.
- **Capaian:** 100% (Realisasi 8 dari Target 8 Kegiatan Usaha).

- **Analisis:** Seluruh hambatan investasi yang masuk dalam agenda penanganan tahun 2025 berhasil diselesaikan sepenuhnya. Ketepatan sasaran dalam *debottlenecking* ini kemungkinan besar menjadi faktor pendorong meningkatnya kepercayaan pelaku usaha untuk tertib menyampaikan LKPM.

4.1.2 Subkegiatan: Subkegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

- **Indikator:** Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko..
- **Capaian: 100%** (Realisasi 400 dari Target 400 Kegiatan Usaha).
- **Analisis:** Kinerja tercapai tepat sesuai target. Hal ini menunjukkan perencanaan anggaran dan manajemen pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara presisi untuk memfasilitasi 400 peserta.

4.1.3 Subkegiatan: Subkegiatan Pengawasan Penanaman Modal

- **Indikator:** Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa, diverifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha melalui inspeksi lapangan serta evaluasi penilaian kepatuhan..
- **Capaian: 100%** (Realisasi 50 dari Target 50 Kegiatan).
- **Analisis:** Kinerja tercapai tepat sesuai target. Pelaksanaan inspeksi lapangan dan evaluasi kepatuhan terhadap 50 kegiatan usaha telah diselesaikan secara tuntas sesuai dengan rencana kerja operasional yang ditetapkan.

5. Program: Pengelolaan Data dan Sistem Penanaman Modal

- **Indikator:** Persentase data dan informasi perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan yang dikelola dan dimanfaatkan.
- **Capaian: 100,50%** (Realisasi 93,47% dari Target 93%).
- **Analisis:** Capaian kinerja program ini telah melampaui target yang ditetapkan, yang merefleksikan komitmen instansi dalam menjaga kualitas tata kelola data penanaman modal secara berkelanjutan. Realisasi sebesar 93,47% menunjukkan bahwa sistem pengelolaan data telah berjalan dengan stabil, konsisten, dan mampu memenuhi parameter teknis yang telah direncanakan.

Secara rincinya, angka ketercapaian tersebut diperoleh dari hasil pengelolaan dan pemanfaatan sebanyak 11.494 data/informasi dari total keseluruhan 12.297 data yang tersedia. Peningkatan realisasi yang melampaui target ini dipicu oleh tingginya aktivitas

pemanfaatan sistem informasi penanaman modal, baik oleh pemohon izin maupun calon investor. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem informasi yang disediakan telah berfungsi secara efektif sebagai rujukan data yang kredibel dan mudah diakses, sehingga mendukung transparansi serta akurasi informasi bagi para pemangku kepentingan.

5.1 Kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

- **Indikator:** Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terdata di sistem elektronik terintegrasi.
- **Capaian:** **127,60%** (Realisasi 96,98% dari Target 76%).
- **Analisis:** Kegiatan ini mencatatkan pelampauan target yang sangat signifikan dengan tingkat ketercapaian sebesar 127,60%. Capaian riil sebesar 96,98% menunjukkan adanya akselerasi digitalisasi data yang sangat efektif dan melampaui proyeksi awal tahun. Integrasi data ke dalam sistem elektronik berjalan lebih cepat, yang didorong oleh optimalisasi penggunaan sistem OSS-RBA serta aplikasi pendukung daerah lainnya.

Secara teknis, angka tersebut diperoleh dari hasil pendataan sebanyak 11.926 data perizinan dan nonperizinan ke dalam sistem elektronik dari total keseluruhan 12.297 data yang tersedia. Sepanjang tahun 2025, telah dilakukan pemutakhiran prosedur secara masif sehingga mayoritas layanan kini dapat diproses secara elektronik. Peningkatan pesat ini mencerminkan komitmen instansi dalam mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel, guna mendukung kemudahan berusaha di daerah..

5.1.1 Level Subkegiatan: Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

- **Indikator:** umlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji, dan dimanfaatkan.
- **Capaian:** **100%** (12 dari 12 Dokumen).
- **Analisis:** Kinerja tercapai tepat sesuai target. Penyelesaian 12 dokumen ini menunjukkan kedisiplinan dalam pelaporan dan

pengkajian data secara periodik (setiap bulan dalam satu tahun anggaran) berjalan dengan tepat waktu dan akuntabel.

6. Program: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- **Indikator:** Nilai AKIP Perangkat Daerah.
- **Capaian:** **99,94%** (Realisasi 84.25 dari Target 84.30).
- **Analisis:** Capaian kinerja program berada pada kategori Sangat Baik, meskipun terdapat selisih tipis sebesar 0.05 poin dari target yang ditetapkan. Nilai 84.25 menunjukkan bahwa kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sudah berada pada level yang sangat tinggi (predikat A), mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran serta keselarasan antara perencanaan dan hasil.

6.1 Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- **Indikator:** Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi yang tersusun.
- **Capaian:** **100%** (Realisasi 9 dari Target 9 Dokumen).
- **Analisis:** Kinerja kegiatan ini telah tercapai sepenuhnya dengan predikat Sangat Baik. Keberhasilan pemenuhan target 9 (sembilan) dokumen strategis ini mencerminkan kedisiplinan administrasi yang tinggi serta kepatuhan instansi terhadap siklus perencanaan dan pelaporan tahunan yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah.

Adapun rincian dokumen yang telah berhasil disusun meliputi:

1. Dokumen Perencanaan: Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.
2. Dokumen Evaluasi: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Laporan Pengendalian dan Evaluasi (Dalev) Triwulan I, II, III, dan IV.

Tersusunnya seluruh dokumen ini secara tepat waktu dan tepat mutu menjamin ketersediaan landasan operasional serta instrumen evaluasi yang akuntabel, yang sangat krusial dalam mendukung kelancaran program kerja perangkat daerah sepanjang tahun anggaran.

6.1.1 Subkegiatan: Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- **Indikator:** Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Pengendalian, dan Evaluasi.
- **Capaian:** 100% (Realisasi 2 dari Target 2 Dokumen).
- **Analisis:** Capaian kinerja pada subkegiatan ini telah terealisasi secara optimal sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan penyusunan 2 (dua) dokumen perencanaan strategis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, merupakan langkah krusial dalam memperkuat tata kelola organisasi.

Penyelesaian kedua dokumen ini berfungsi sebagai instrumen vital dalam memberikan arah kebijakan serta menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi dinas berjalan secara terukur, konsisten, dan akuntabel. Tersusunnya dokumen ini tepat waktu memastikan bahwa program dan kegiatan di masa mendatang memiliki landasan operasional yang kuat serta selaras dengan visi misi pembangunan daerah.

6.1.3 Subkegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- **Indikator:** Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Pengendalian, dan Evaluasi.
- **Capaian:** 100% (Realisasi 7 dari Target 7 Dokumen).
- **Analisis:** Subkegiatan ini telah berhasil memenuhi target penyusunan 7 (tujuh) dokumen evaluasi dan pelaporan secara paripurna. Keberhasilan ini mencakup penyelesaian dokumen-dokumen strategis sebagai berikut:
 1. Laporan Pertanggungjawaban: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
 2. Laporan Evaluasi Berkala: Laporan Pengendalian dan Evaluasi (Dalev) Triwulan I, II, III, dan IV.

Tersusunnya seluruh dokumen tersebut berkontribusi langsung terhadap validitas dan akuntabilitas data kinerja instansi. Hal ini memastikan bahwa setiap progres pelaksanaan program dan kegiatan telah terdokumentasi dengan baik serta dievaluasi secara berkala. Konsistensi dalam pelaporan ini menjadi instrumen

penting bagi manajemen dalam melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) serta menjamin transparansi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

6.2 Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- **Indikator:** Jumlah jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun.
- **Capaian: 100%** (Realisasi 9 dari Target 9 Dokumen).
- **Analisis:** Kinerja pada level kegiatan ini mencapai efisiensi maksimal. Seluruh dokumen laporan keuangan yang direncanakan telah berhasil disusun dan diperiksa tepat waktu sesuai dengan target kuantitas.

6.2.1 Subkegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- **Indikator:** Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN.
- **Capaian: 100%** (Realisasi 36 dari Target 36 Orang/ Bulan).
- **Analisis:** Pemenuhan hak finansial Aparatur Sipil Negara (ASN) telah terlaksana sepenuhnya tanpa kendala. Capaian 100% mengindikasikan bahwa proses administrasi belanja pegawai dilakukan secara konsisten setiap bulannya kepada seluruh target sasaran (36 orang).

6.2.2 Subkegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- **Indikator:** Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN..
- **Capaian: 100%** (Realisasi 12 dari Target 12 Dokumen).
- **Analisis:** Pelaksanaan tugas administratif pendukung ASN berjalan optimal tanpa kendala. Dengan terealisasinya 12 dokumen (rata-rata 1 dokumen per bulan), fungsi layanan internal organisasi dipastikan tetap berjalan lancar sepanjang tahun.

6.2.3 Subkegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- **Indikator:** Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- **Capaian: 100%** (Realisasi 5 dari Target 5 Laporan).
- **Analisis:** Capaian sempurna pada subkegiatan ini sangat krusial karena merupakan tahap finalisasi akuntabilitas keuangan. Realisasi 5 laporan menunjukkan bahwa proses koordinasi antar

unit kerja berjalan solid, sehingga laporan akhir tahun dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat jumlah.

6.2.4 Subkegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- **Indikator:** Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan.
- **Capaian:** 100% (Realisasi 23 dari Target 23 Laporan).
- **Analisis:** Subkegiatan ini menunjukkan performa operasional yang sangat solid. Keberhasilan menyusun 23 laporan secara tepat jumlah mencerminkan koordinasi yang intensif dan berkelanjutan di tingkat internal. Capaian ini merupakan faktor kunci yang menjaga keakuratan data keuangan di tingkat kegiatan.

6.3 Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- **Indikator:** Jumlah jenis Layanan Kepegawaian.
- **Capaian:** 100% (Realisasi 2 dari Target 2 layanan).
- **Analisis:** Kinerja pada level kegiatan ini mencapai target sempurna. Hal ini merefleksikan bahwa seluruh rencana layanan kepegawaian telah dieksekusi dengan tepat jumlah dan tepat waktu, memastikan kebutuhan administratif SDM di internal organisasi terpenuhi secara optimal.

6.3.1 Subkegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

- **Indikator:** Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan.
- **Capaian:** 100% (Realisasi 1 dari Target 1 Paket).
- **Analisis:** Subkegiatan ini telah terlaksana sepenuhnya sesuai perencanaan. Keberhasilan pengadaan 1 paket pakaian dinas ini secara langsung mendukung aspek identitas dan kedisiplinan ASN, yang merupakan bagian dari indikator layanan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian.

6.3.2 Subkegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

- **Indikator:** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
- **Capaian:** 100% (Realisasi 50 dari Target 50 orang).

- **Analisis:** Subkegiatan ini berhasil direalisasikan sepenuhnya. Dengan terlaksananya diklat bagi 50 orang pegawai, instansi telah menunjukkan komitmen nyata dalam peningkatan kompetensi aparatur. Keberhasilan pengembangan SDM ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan profesionalisme kerja.

6.4 Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

- **Indikator:** Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum.
- **Capaian:** 100% (Realisasi 6 dari Target 6 Jenis layanan).
- **Analisis:** Kinerja pada level administrasi umum tercapai sepenuhnya. Keberhasilan merealisasikan 6 jenis layanan ini menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan operasional kantor harian yang mendukung kenyamanan dan kelancaran kerja seluruh pegawai.

6.4.1 Subkegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

- **Indikator:** Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- **Capaian:** 100% (Realisasi 1 dari Target 1 Paket).
- **Analisis:** Pemenuhan kebutuhan prasarana dasar (listrik dan penerangan) telah tuntas dilaksanakan. Walaupun terlihat teknis, subkegiatan ini adalah vital untuk memastikan gedung kantor berfungsi optimal demi mendukung produktivitas yang berdampak pada nilai AKIP instansi secara keseluruhan.

6.4.2 Subkegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- **Indikator:** Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.
- **Capaian:** 100% (Realisasi 2 dari Target 2 Paket).
- **Analisis:** Kinerja pada level teknis (subkegiatan) juga mencapai target 100%. Pengadaan aset pendukung kerja (sarana prasarana) telah diselesaikan sesuai kuantitas yang direncanakan, yang berarti kebutuhan fisik untuk menunjang kerja pegawai telah terpenuhi secara tepat waktu dan jumlah.

6.4.3 Subkegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- **Indikator:** Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.
- **Capaian:** 100% (Realisasi 3 dari target 3 Paket).

- **Analisis:** Capaian pada level subkegiatan ini juga mencapai 100%. Pengadaan bahan logistik (seperti ATK atau kebutuhan harian kantor lainnya) telah terpenuhi secara kuantitas sesuai perencanaan, sehingga mendukung kelancaran administrasi di level kegiatan.

6.4.4 Subkegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- **Indikator:** Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.
- **Capaian: 100%** (Realisasi 2 dari target 2 Paket).
Analisis: Capaian kinerja adalah **100%**. Kebutuhan spesifik terkait penggandaan dokumen dan cetak pendukung kerja kantor telah terpenuhi secara tepat jumlah.

6.4.5 Subkegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- **Indikator:** Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan
- **Capaian: 100%** (Realisasi 3 dari target 3 Dokumen).
- **Analisis:** Capaian pada level subkegiatan ini juga mencapai **100%**. Pemenuhan aspek literatur hukum dan bahan bacaan formal telah terpenuhi sesuai rencana, yang secara langsung mendukung aspek legalitas dan wawasan aparatur di lingkungan kerja.

6.4.6 Subkegiatan: Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD

- **Indikator:** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi
- **Capaian: 180%** (Realisasi 9 dari target 5 Laporan).
- **Analisis:** Menunjukkan intensitas koordinasi yang tinggi. Capaian 180% mengindikasikan bahwa frekuensi rapat/konsultasi terjadi hampir dua kali lipat dari rencana awal. Disebabkan oleh banyaknya undangan koordinasi dari Eksternal.

6.5 Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- **Indikator:** Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang.
- **Capaian: 100%** (Realisasi 3 dari Target 3 Jenis Jasa).
- **Analisis:** Kinerja pada level kegiatan ini menunjukkan tingkat **Efektivitas Sempurna**. Seluruh jenis jasa penunjang yang direncanakan telah berhasil disediakan secara tepat jumlah sesuai

dengan target tahunan. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pengadaan jasa pendukung operasional berjalan tanpa kendala berarti.

6.5.1 Subkegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- **Indikator:** Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- **Capaian:** 100% (Realisasi 12 dari Target 12 Laporan).
- **Analisis:** Capaian pada subkegiatan ini menunjukkan konsistensi yang sangat baik dengan status **Tuntas**. Realisasi 12 laporan mengindikasikan bahwa kewajiban pelaporan bulanan atau periodik terkait jasa surat menyurat telah terpenuhi sepanjang tahun tanpa ada keterlambatan atau kekurangan dokumen.

6.5.2 Subkegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

- **Indikator:** Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan.
- **Capaian:** 100% (Realisasi 12 dari Target 12 Laporan).
- **Analisis:** Subkegiatan ini berhasil diselesaikan dengan status **Tuntas**. Realisasi 12 laporan (asumsi laporan bulanan dalam satu tahun anggaran) menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran dan administrasi untuk kebutuhan vital (telepon/internet, air, dan listrik) telah dilakukan secara disiplin dan konsisten setiap bulannya.

6.5.3 Subkegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- **Indikator:** Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.
- **Capaian:** 100% (Realisasi 12 dari Target 12 Laporan).
- **Analisis:** Capaian subkegiatan ini berstatus **Tuntas**. Realisasi 12 laporan menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan pelayanan umum kantor (seperti kebersihan, keamanan, atau operasional kantor lainnya) yang dilaporkan secara rutin setiap bulan selama satu tahun anggaran tanpa ada kendala administratif.

6.6 Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

- **Indikator:** Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
- **Capaian:** 100% (Realisasi 3 dari Target 3 Jenis barang).
- **Analisis:** Kinerja pada level kegiatan ini menunjukkan tingkat Efektivitas Sempurna. Seluruh kategori barang milik daerah yang

direncanakan untuk mendapatkan pemeliharaan telah tertangani sepenuhnya sesuai target. Hal ini krusial untuk menjaga usia pakai aset daerah.

6.6.1 Subkegiatan: Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas

- **Indikator:** Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya.
- **Capaian: 100%** (Realisasi 29 dari Target 29 unit).
- **Analisis:** Subkegiatan ini berstatus **Tuntas**. Tercapainya realisasi 29 unit kendaraan menunjukkan:
 - **Kepatuhan Hukum:** Kewajiban pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas telah terpenuhi 100%.
 - **Kesiapan Operasional:** Pemeliharaan fisik kendaraan telah mencakup seluruh armada yang terdaftar, sehingga menjamin kelancaran mobilitas lapangan bagi aparatur tanpa kendala teknis maupun administrasi kendaraan.

6.6.2 Subkegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- **Indikator:** Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.
- **Capaian: 100%** (Realisasi 211 dari Target 211 unit).
- **Analisis:** Subkegiatan ini berstatus **Tuntas dan Tepat Sasaran**. Keberhasilan memelihara 211 unit peralatan dan mesin secara tepat jumlah menunjukkan:
 - **Ketelitian Inventarisasi:** Perencanaan jumlah unit sesuai dengan database aset yang ada.
 - **Keberlanjutan Fungsi:** Seluruh peralatan kantor, mesin, atau perangkat teknis pendukung telah melalui proses pemeliharaan, sehingga meminimalkan risiko kerusakan yang dapat menghambat produktivitas kerja pegawai.

6.6.3 Subkegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- **Indikator:** Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.
- **Capaian: 100%** (Realisasi 2 dari Target 2 unit).
- **Analisis:** Subkegiatan ini berstatus **Tuntas dan Tepat Sasaran**. Keberhasilan dalam merealisasikan pemeliharaan/rehabilitasi pada 2 unit gedung kantor menunjukkan:

- **Keberlanjutan Aset:** Terjaganya kondisi fisik bangunan kantor guna menjamin kenyamanan dan keamanan pelayanan publik maupun aktivitas kerja internal.
- **Ketepatan Perencanaan:** Realisasi fisik yang sesuai dengan target unit menunjukkan proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi/pemeliharaan berjalan sesuai jadwal (on-schedule).

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Meningkatnya Efektivitas Investasi Daerah-	Icor	Indikator baru	Indikator baru	8,29	8,41	9,6	Belum Rilis dari BPS	Tidak bisa dihi tung karena indikator baru	Tidak bisa dihi tung karena indikator baru	Belum Rilis dari BPS
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	Indikator baru	Indikator baru	36,63	36,55	36,63	Belum Rilis dari BPS	Tidak bisa dihi tung karena indikator baru	Tidak bisa dihi tung karena indikator baru	Belum Rilis dari BPS

Laporan ini menyajikan evaluasi terhadap sasaran strategis daerah dalam meningkatkan efektivitas investasi melalui dua indikator utama: Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

1. Indikator ICOR (Incremental Capital Output Ratio)

Indikator ini digunakan untuk mengukur efisiensi investasi di suatu daerah. Semakin rendah nilai ICOR, semakin tinggi efisiensi investasi tersebut.

Target & Realisasi: Pemerintah daerah telah menetapkan target ICOR sebesar 8,29 untuk tahun 2025. Pada tahun 2023, realisasi berada di angka 8,41, sementara pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 9,6.

Status Capaian: Untuk tahun 2023 dan 2024, capaian kinerja secara formal belum dapat dihitung karena ICOR merupakan indikator baru dalam sistem pelaporan ini. Sementara itu, data realisasi untuk tahun 2025 masih menunggu rilis resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

2. Indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Indikator ini merepresentasikan penambahan aset tetap dalam kurun waktu tertentu, yang mencerminkan pertumbuhan fisik investasi di daerah.

Target & Realisasi: Target persentase PMTB untuk tahun 2025 dipatok sebesar 36,63%. Tren realisasi menunjukkan perkembangan positif, di mana pada tahun 2023 tercatat sebesar 36,55% dan meningkat tepat ke angka 36,63% pada tahun 2024.

Status Capaian: Sama halnya dengan indikator ICOR, capaian persentase PMTB untuk tahun 2023 dan 2024 dikategorikan "tidak bisa dihitung" karena statusnya sebagai indikator baru. Data final untuk tahun 2025 juga masih berstatus menunggu rilis data dari BPS.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah	Realisasi Investasi	2,6	2,7	5.3	4.2	4,4	1.8	161, 53%	162, 96%	33, 96%
2	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Indikator baru	Indikator baru	4,71	4,27	4,70	4.85	Capaian tidak dihi tung	Capaian tidak dihi tung	102, 97%
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	92,02	92,03	93,02	92,71	92,82	93.11	100, 74%	100, 85%	100, 09%

Berdasarkan data pada **Tabel 3.5: Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran** yang Anda lampirkan, berikut adalah analisis tren capaian untuk ketiga indikator kinerja utama tersebut:

1. Analisis Realisasi Investasi Daerah

Indikator ini menunjukkan fluktuasi yang sangat tajam, terutama pada tahun terakhir yang tercatat.

- **Tren 2023–2024:** Mengalami tren positif. Realisasi meningkat dari **4,2** menjadi **4,4**, dengan capaian yang sangat tinggi (di atas **160%**) karena target yang ditetapkan tergolong rendah dibandingkan kemampuan realisasi.
- **Tren 2024–2025:** Terjadi penurunan performa yang signifikan. Meskipun target dinaikkan hampir dua kali lipat menjadi **5,3**, realisasinya justru turun ke angka **1,8**.
- **Kesimpulan:** Capaian mengalami penurunan dari **162,96%** menjadi hanya **33,96%**. Hal ini mengindikasikan adanya kendala eksternal berupa kondisi ekonomi yang sedang lesu sehingga tidak banyak pelaku usaha merealisasikan investasinya.

2. Analisis Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indikator ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan konsisten.

- **Tren 2023–2025:** Realisasi terus meningkat setiap tahunnya, mulai dari **4,27** (2023), naik ke **4,70** (2024), dan mencapai **4,85** (2025).
- **Status Capaian:** Pada 2023 dan 2024, capaian tidak dapat dihitung karena merupakan "Indikator Baru". Namun, pada 2025, ketika target ditetapkan sebesar **4,71**, organisasi berhasil melampauinya dengan capaian **102,97%**.
- **Kesimpulan:** Tren menunjukkan keberhasilan dalam standarisasi pelayanan publik yang terus membaik dari tahun ke tahun.

3. Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator ini menunjukkan tren **positif linear** yang paling stabil di antara indikator lainnya.

- **Pertumbuhan Realisasi:** Skor IKM merangkak naik secara konsisten dari **92,71** naik ke **92,82** naik ke **93,11**.

- **Konsistensi Target:** Meskipun target setiap tahun dinaikkan secara moderat, organisasi selalu mampu melampaui angka 100% (selalu berada di kisaran **100,09%** hingga **100,85%**).

3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Target Akhir Renstra)

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka menengah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah	Realisasi Investasi	1,8	5.32	33,83%
2	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4.85	4'75	102,11%
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	93.11	94,02	99,03%

Berdasarkan data pada **Tabel 3.6** (Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah), berikut adalah analisis perkembangan capaian kinerja tahun 2025 menuju target akhir Rencana Strategis (Renstra):

1. Realisasi Investasi Daerah

Indikator ini menunjukkan hambatan besar dan menjadi area yang memerlukan perhatian serius karena perkembangannya masih jauh dari target akhir. Target Akhir Renstra: Rp. 5,32 Triliun. Realisasi Tahun 2025: Rp. 1,8 Triliun. Status Kemajuan: 33,83%.

Analisis: Terdapat defisit sebesar **66,17%** untuk mencapai target akhir Renstra. Jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya (2024) yang sempat mencapai realisasi Rp. 4,4 Triliun, penurunan ke angka Rp. 1,8 Triliun di tahun 2025 menunjukkan adanya kemunduran signifikan yang dapat mengancam ketercapaian target jangka menengah

2. Indikator Pelayanan Publik (IPP)

Indikator ini menunjukkan performa yang paling progresif karena telah berhasil melampaui target jangka menengah lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Target Akhir Renstra: 4,75. Realisasi Tahun 2025: 4,85. Status Kemajuan: 102,11%.

Analisis: Organisasi telah mencapai keberhasilan penuh pada indikator ini. Fokus selanjutnya adalah mempertahankan kualitas layanan agar nilai tidak mengalami penurunan di tahun berikutnya.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator ini berada pada jalur yang sangat tepat (*on track*) dan hampir mencapai target akhir yang ditetapkan. Target Akhir Renstra: 94,02. Realisasi Tahun 2025: 93,11. Status Kemajuan: 99,03%.

Analisis: Dengan tingkat kemajuan yang hampir menyentuh 100%, target jangka menengah untuk kepuasan masyarakat diprediksi akan tercapai sepenuhnya pada triwulan atau tahun mendatang melalui konsistensi pelayanan.

3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan organisasi lain yang setipe/Provinsi/Nasional (Benchmark Kinerja)

Tabel 3.11

Perbandingan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Organisasi lain yang setipe/Provinsi/Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2025	Realisasi Kabupaten	Realisasi Propinsi	Realisasi Nasional
1	Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah	Realisasi Investasi	Triliun	5.3	1.8	147,7	1.931,2

Berdasarkan **Tabel 3.7** mengenai Perbandingan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Organisasi Lain/Provinsi/Nasional, berikut adalah narasi analisis untuk laporan kinerja Anda:

Analisis Komparatif Capaian Realisasi Investasi Tahun 2025

Secara umum, capaian realisasi investasi organisasi pada tahun 2025 menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) yang sangat lebar jika dibandingkan dengan performa di tingkat Provinsi maupun Nasional. Berikut adalah rincian perbandingannya:

1. Perbandingan terhadap Target Renstra Internal Realisasi investasi organisasi pada tahun 2025 tercatat sebesar **1,8 Triliun**. Angka ini baru mencapai sekitar **33,9%** dari target Renstra 2025 yang ditetapkan sebesar **5,3 Triliun**. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap strategi penarikan investasi di tingkat kabupaten.

2. Benchmark terhadap Capaian Provinsi Jawa Timur Dibandingkan dengan capaian tingkat Provinsi, terdapat perbedaan skala yang sangat signifikan. Provinsi Jawa Timur berhasil membukukan realisasi investasi sebesar **147,7 Triliun** pada periode yang sama. Rendahnya kontribusi organisasi (1,8 Triliun) terhadap total provinsi menunjukkan bahwa daya tarik investasi di wilayah kerja organisasi

masih belum optimal dalam menangkap peluang pertumbuhan ekonomi regional.

3. Benchmark terhadap Capaian Nasional Di level Nasional, tren investasi menunjukkan performa yang sangat kuat dengan total realisasi mencapai **1.931,2 Triliun**. Kondisi ini membuktikan bahwa iklim investasi makro sebenarnya sedang berada dalam tren positif. Kontradiksi antara pertumbuhan nasional yang masif dengan penurunan realisasi di tingkat organisasi (dari 4,4 Triliun di tahun 2024 menjadi 1,8 Triliun di tahun 2025) memberikan sinyal adanya kendala spesifik yang bersifat lokal atau sektoral.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dilakukan guna merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendukung ketercapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan mengetahui penyebab, maka alternatif solusi dapat dirumuskan dengan baik. Adapun penyebab sesuai tabel berikut :

Tabel 3.12
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Penyebab keberhasilan/kegagalan	Alternatif solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi perbaikan/ rencana tindak lanjut
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah	Realisasi Investasi	Penyebab Kegagalan (Faktor Eksternal): * Terjadi anomali lokal di mana meskipun tren investasi Nasional	Perubahan Strategi: Melakukan jemput bola berupa klinik investasi kepada pelaku usaha	Melakukan promosi potensi investasi daerah secara intensif dan memperkuat insentif bagi

			(1.931,2 T) dan Provinsi (147,7 T) tumbuh positif, daya saing daerah mengalami kontraksi akibat perubahan regulasi perizinan di tingkat pusat yang belum sepenuhnya teradopsi oleh sistem di daerah. Kondisi ekonomi sektoral yang spesifik di wilayah Kabupaten menghambat masuknya investor besar pada tahun berjalan. Penyebab Kegagalan (Faktor Internal): * SDM: Kurangnya tenaga fungsional promosi penanaman modal yang mampu melakukan negosiasi strategis.	untuk membantu pelaporan LKPM. Fokus Intervensi: Mengalihkan fokus pada penguatan investasi Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk menjaga stabilitas angka investasi di tengah kelesuan investasi besar.	investor lokal guna mengejar ketertinggalan target jangka menengah sebesar 66,17%.
--	--	--	--	--	---

			Teknologi: Sistem OSS (Online Single Submission) di daerah sering mengalami kendala teknis (sinkronisasi data) sehingga menghambat pelaporan realisasi dari pelaku usaha.		
2	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Peringkat Daerah	Penyebab Keberhasilan (Faktor Internal): Kepemimpinan: Adanya komitmen kuat dari pimpinan untuk melakukan standardisasi seluruh unit pelayanan publik. SOP & Teknologi: Implementasi digitalisasi pelayanan yang memangkas waktu tunggu dan meningkatkan transparansi prosedur.	Melakukan evaluasi berkala per bulan yang nilai pelayanannya masih di bawah standar rata-rata.	Melakukan replikasi inovasi pelayanan agar kualitas layanan meningkat.

			Penyebab Keberhasilan (Faktor Eksternal): * Tingginya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan melalui kanal pengaduan resmi.		
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Peringkat Daerah	Penyebab Keberhasilan (Faktor Internal): Koordinasi: Koordinasi yang baik antar unit kerja dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat secara cepat (kurang dari 24 jam). SDM: Pelatihan hospitality bagi petugas garda terdepan (frontliner) dilakukan secara rutin. Penyebab Keberhasilan (Faktor Eksternal):	Pengembangan survei kepuasan elektronik (e-Survei) yang terintegrasi di setiap loket layanan untuk mendapatkan data real-time.	Mempertahankan standar layanan yang ada dan memperluas cakupan survei hingga ke pelosok desa/kecamatan untuk mendapatkan gambaran kepuasan yang lebih komprehensif.

			Kondisi sosial-politik yang stabil mendukung rasa aman dan nyaman masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah daerah.		
--	--	--	---	--	--

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Secara umum efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan guna meminimalisir sumber daya yang terbuang dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Beberapa hal yang ingin di capai dalam penguatan efisiensi sumber daya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menghemat atau juga mengurangi penggunaan sumber daya didalam melakukan program/kegiatan;
- b. Memaksimalkan penggunaan segala sumber daya yang dipunyai sehingga tidak ada yang terbuang dengan percuma;
- c. Meningkatkan kinerja perangkat daerah sehingga hasil atau output-nya semakin maksimal;
- d. Guna mencapai sebuah hasil atau tujuan sasaran sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tuban selama tahun 2025, dapat di gambarkan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.12
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyer apan Angga ran	Tingkat Efisiensi (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
					(Realisasi/ Target) x 100%	(Realisasi/ Pagu Anggaran) x 100%)	(% Capaian Kinerja-% penyera pan Anggaran)
	Tujuan Meningkatnya Efektivitas Investasi Daerah	ICOR	8,29	BPS belum rilis		88,57 %	
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	36,63	BPS belum rilis			
	Sasaran 1 : Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah	Realisasi Investasi (Rupiah Triliun)	5,3	1.8	33,96 %	88,75 %	141,29 %
	Sasaran 2 : Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4,71	4,85 (A)	102,97 %		
	Sasaran 3 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	92,82	93,11	100,31 %		

1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi	100 %	33,96 %	33,96 %	100 %	-66,04 %
1.1	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Kebijakan kemudahan penanaman modal	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	99,99 %	0,01 %
1.1.1	Subkegiatan Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	99,99 %	0,01 %
1.2	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi penanaman modal	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	0 %
1.2.1	Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0 %
1.2.2	Subkegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi	Jumlah dokumen peta potensi	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	0 %

	Kabupaten/ Kota	investasi kabupaten/ kota					
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Calon Investor yang Menanamkan Modal	10 %	10 %	100 %	99,58 %	0,42 %
2.1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Calon Investor	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	100 %	99,58 %	0,42 %
2.1.1	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/ kota	5 Dokumen	9 Dokumen	180 %	99.58 %	80,42 %
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	100 %	83,86 %	16,14 %
3.1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan	Persentase pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani secara elektronik	76 %	96.98 %	127 %	83,86 %	43,14 %

	Daerah Kabupaten/Kota						
3.1.1	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapat kan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	450 Pelaku Usaha	3.930 Pelaku Usaha	873 %	95,55 %	777,45 %
3.1.2	Subkegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/ kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	140 Kegiatan Usaha	140 Kegiatan Usaha	96.42 %	65,44 %	30,98 %
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampai kan LKPM Sesuai	60 %	63,64 %	106,06 %	99,25 %	6,81 %

		Ketentuan					
4.1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	220 Pelaku Usaha	324 Pelaku Usaha	147,27 %	99,25 %	48,02 %
4.1.1	Subkegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahnya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasi kegiatan usahanya	8 Kegiatan Usaha	8 Kegiatan Usaha	100 %	98,18 %	1,82 %
4.1.2	Subkegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	400 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha	100 %	100 %	0 %
4.1.3	Subkegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	100 %	99,28 %	0,72 %

		yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku inspeksi lapangan terhadap kegiatan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha					
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi peizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan yang dikelola dan dimanfaatkan	93 %	93.47 %	100,50 %	9,40 %	8,10 %
5.1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terdata di sistem elektronik terintegrasi	76 %	96.98 %	127,60 %	92,40 %	35,20 %

5.1.1	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji, dan dimanfaatkan	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	92,40 %	7,60 %
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	84.30	84.25	99.94 %	87,17 %	12,77 %
6.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi yang tersusun	9 Dokumen	9 Dokumen	100 %	99.37 %	0,63 %
6.1.1	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	99,27 %	0,73 %
6.1.2	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	99,90 %	0,10 %

6.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Dokumen	9 Dokumen	100 %	82,17 %	17,83 %
6.2.1	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/ Bulan	36 Orang/ Bulan	100 %	81,64 %	18,36 %
6.2.2	Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	88,36 %	11,64 %
6.2.3	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	100 %	98,89 %	1,11 %
6.2.4	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan	23 Laporan	23 Laporan	100 %	99,81 %	0,19 %

		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
6.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	2 Layanan	2 Layanan	100 %	99,40 %	
6.3.1	Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100 %	98,98 %	1,11 %
6.3.2	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 Orang	50 Orang	100 %	99,41 %	0,59 %
6.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	6 Jenis Layanan	6 Jenis Layanan	100 %	93,37 %	6,63 %
6.4.1	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	1 Paket	100 %	99,97 %	0,03 %

		Disediakan					
6.4.2	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100 %	87,51 %	12,49 %
6.4.3	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100 %	99,79 %	0,21 %
6.4.4	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100 %	92,89 %	7,11 %
6.4.5	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	88,25 %	11,75 %
6.4.6	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	9 Laporan	180 %	97,47 %	82,53 %
6.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	3 Jenis Jasa	3 Jenis Jasa	100 %	91,96 %	8,04 %

6.5.1	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100 %	99,96 %	0,04 %
6.5.2	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	92,82 %	7,18 %
6.5.3	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	91,24 %	8,76 %
6.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Jenis Barang	3 Jenis Barang	100 %	98,62 %	1,38 %
6.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	29 Unit	29 Unit	100 %	94,94 %	5,06 %

		Pajak dan Perizinannya					
6.6.2	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	211 Unit	211 Unit	100 %	98,98 %	1,02 %
6.6.3	Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100 %	99,52 %	0,48 %

Berdasarkan data tabel kinerja dan realisasi anggaran yang Anda sajikan, berikut adalah draf **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya** untuk laporan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban.

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis efisiensi diukur dengan membandingkan antara **Capaian Kinerja Output** dengan **Penyerapan Anggaran**. Secara umum, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat baik, di mana sebagian besar program mencapai target 100% atau lebih dengan penyerapan anggaran yang terkendali.

1. Efisiensi Anggaran (Value for Money)

Berdasarkan formulasi % Capaian Kinerja - % Penyerapan Anggaran, terlihat beberapa area dengan efisiensi menonjol:

- **Program Pelayanan Penanaman Modal (Efisiensi 16,14%):**
Program ini menunjukkan efisiensi tinggi karena mampu mencapai target kinerja 100% dengan penyerapan anggaran hanya 83,86%. Hal ini didorong oleh efisiensi pada **Subkegiatan Pelayanan Perizinan Elektronik** yang mencapai kinerja **873%** (melayani 3.930 pelaku usaha dari target 450) dengan serapan anggaran 95,55%. Ini mengindikasikan bahwa program

pendampingan, jempol lari, roadshow pelayanan public dan sosialisasi berjalan efektif dan efisien

- **Optimalisasi Kegiatan Promosi:** Pada kegiatan Promosi Penanaman Modal, terdapat capaian dokumen hasil promosi sebesar **180%** (9 dokumen dari target 5) dengan serapan anggaran 99,58%. Hal ini menunjukkan penggunaan sumber daya yang sangat produktif dalam menghasilkan dokumen teknis promosi melampaui target awal.

2. Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Operasional

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan:** Kegiatan administrasi keuangan dan kepegawaian mencapai target 100% dengan serapan anggaran di kisaran 82% - 87%. Khususnya pada **Subkegiatan Gaji dan Tunjangan ASN** (Efisiensi 18,36%), realisasi pembayaran terlaksana bagi 36 orang/bulan secara tepat waktu meskipun terdapat sisa anggaran (mungkin disebabkan oleh efisiensi tunjangan atau adanya posisi kosong/bezetting).
- **Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi:** Terjadi efisiensi signifikan pada **Kegiatan Rapat Koordinasi (Efisiensi 82,53%)**. Capaian laporan mencapai 180% (9 laporan dari target 5). Hal ini mengindikasikan adanya perubahan pola kerja, seperti:
 - Pengalihan rapat dari tatap muka (luring) ke **daring (Zoom/Virtual)** yang memangkas biaya konsumsi dan akomodasi.
 - Penggabungan beberapa agenda rapat dalam satu waktu (integrasi kegiatan).

3. Efisiensi Sarana dan Prasarana

- **Pemeliharaan BMD:** Pemeliharaan 29 unit kendaraan dinas, 211 unit mesin, dan 1 unit gedung kantor mencapai target 100% dengan efisiensi sisa anggaran sekitar 1-5%. Hal ini menunjukkan manajemen pemeliharaan aset dilakukan secara selektif berdasarkan skala prioritas kerusakan tanpa mengurangi nilai kemanfaatan aset tersebut.

4. Ringkasan Upaya Efisiensi yang Telah Dilakukan

Secara kualitatif, efisiensi dalam tabel tersebut merupakan hasil dari:

1. **Transformasi Digital:** Migrasi pelayanan ke sistem elektronik secara masif sehingga volume layanan (pelaku usaha) meningkat tajam tanpa membebani anggaran operasional kantor secara signifikan.
2. **Rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas & Rapat:** Optimalisasi anggaran melalui kegiatan koordinasi yang lebih ringkas dan pemanfaatan teknologi informasi.
3. **Kemitraan Strategis:** Memaksimalkan kerjasama dengan pihak ketiga/UMKM (capaian 100%) melalui fasilitasi yang tepat sasaran, sehingga anggaran stimulus dapat digunakan secara efektif.

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Perubahan Rencana Strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 berbuah pada konsekuensi perubahan Tujuan dan sasaran Organisasi. Perubahan juga terjadi pada program unggulan yang menjadi tulang punggung pelaksanaan urusan Penanaman Modal. Terdapat 3 (sasaran) strategis yang didukung oleh beberapa program unggulan. Masing-masing program unggulan telah berhasil menjadi penggungkit keberhasilan dalam mencapai target kinerja strategis perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis ke-1 ,yaitu meningkatnya capaian kinerja perencanaan daerah didukung oleh program Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Program Promosi Penanaman Modal Dengan dukungan dua program tersebut peningkatan realisasi Investasi dapat di capai. Sasaran Strategis ke-2 yaitu Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima didukung oleh Program Pelayanan Penanaman Modal.

Masing program unggulan mendukung ketercapaian target kinerja Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban yang digambarkan pada tabel 3.1.7 berikut :

Tabel 3.13
Analisis Program Kegiatan Penunjang
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Unggulan	Alasan Mengapa Program/Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian/ Inovasi Yang Mendukung
1	2	3	4	5
1	Sasaran 1: Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah	Realisasi Investasi (Rupiah Triliun)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program ini menjadi pondasi dalam menciptakan kepastian hukum dan penyederhanaan regulasi . Keberhasilannya diukur dari terciptanya iklim usaha yang kondusif, sehingga investor merasa aman untuk menanamkan modal. Inovasi seperti penyusunan <i>Investment Project Ready to Offer</i> (IPRO) memudahkan investor melihat potensi daerah secara konkret.
			Program Promosi Penanaman Modal	Program ini berfungsi sebagai pendorong eksposur potensi daerah ke kancah nasional maupun internasional. Keberhasilannya berdampak langsung pada peningkatan minat investor. Inovasi digital dalam promosi (seperti portal investasi interaktif) memastikan informasi mengenai peluang investasi di Tuban dapat diakses secara <i>real-time</i> dan transparan.
2	Sasaran 2: Terwujudnya kualitas	Indeks Pelayanan Publik	Program Pelayanan Penanaman	Program ini menunjang keberhasilan melalui akselerasi kecepatan dan ketepatan

	pelayanan publik yang prima	(IPP) Perangkat Daerah	Modal	proses perizinan. Kualitas pelayanan yang prima (IPP tinggi) tercapai karena adanya standardisasi layanan dan transparansi biaya/waktu. Inovasi seperti integrasi sistem perizinan berbasis elektronik (OSS-RBA) dan layanan pendampingan (<i>coaching</i>) bagi pelaku usaha menjadi kunci utama peningkatan kepuasan masyarakat/ investor.
--	-----------------------------	------------------------	-------	---

Berdasarkan data pada Tabel 3.8 mengenai Analisis Program Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja, berikut adalah narasi ringkasnya:

Analisis kinerja instansi berfokus pada dua sasaran strategis utama yang didukung oleh program-program unggulan spesifik:

1. Peningkatan Realisasi Investasi Daerah

Sasaran untuk meningkatkan realisasi investasi (dalam satuan Rupiah Triliun) didorong melalui dua program utama:

- **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal:** Program ini berperan sebagai fondasi untuk menciptakan kepastian hukum dan penyederhanaan regulasi guna membangun iklim usaha yang kondusif bagi investor. Inovasi pendukungnya meliputi penyusunan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) untuk memetakan potensi daerah secara konkret.
- **Program Promosi Penanaman Modal:** Berfungsi meningkatkan eksposur potensi daerah ke tingkat nasional maupun internasional untuk menarik minat investor. Inovasi yang diunggulkan adalah penggunaan portal investasi interaktif yang menyajikan data secara transparan dan *real-time*.

2. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima

Sasaran kedua diukur melalui Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah dengan dukungan program berikut:

- **Program Pelayanan Penanaman Modal:** Program ini fokus pada akselerasi kecepatan dan ketepatan proses perizinan melalui standardisasi layanan. Kunci utama keberhasilannya adalah penyediaan layanan pendampingan (*coaching*) bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kepuasan publik dan investor.

Secara keseluruhan, strategi ini mengintegrasikan antara penguatan regulasi, promosi yang agresif, dan digitalisasi pelayanan untuk memastikan target kinerja tahun 2025 tercapai secara optimal.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja:

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran

N o	Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Urusan Penanaman Modal	9.551.256.391, 81	8.459.224.899, 00	88,57 %
	Tujuan Meningkatkan Efektivitas Investasi Daerah	9.551.256.391, 81	8.459.224.899, 00	88,57 %
	Sasaran 1 : Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah			
A	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	420.515.602,5 0	351.163.432	100%
1	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	29.381.602,50	29.380.000	99.99 %

	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	29.381.602,50	29.380.000	99.99 %
2	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	391.134.000	391.133.000	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ kota	102.574.000	102.573.000	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	288.560.000	288.560.000	100%
B	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	473.145.000	471.137.140	99.58 %
1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	473.145.000	471.137.140	99.58 %
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	473.145.000	471.137.140	99.58 %
E	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	195.479.956	194.007.552	99.25 %
1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	195.479.956	194.007.552	99.25 %
	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	53.500.000	52.528.500	98.18 %
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	72.400.000	72.400.000	100%

	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	69.579.956	69.079.052	99.28 %
	Sasaran 2 : Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	497.018.380	430.436.955	86.60 %
C	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	337.413.880	282.960.030	83.86 %
1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	337.413.880	282.960.030	83.86 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	206.436.680	197.248.530	95.55 %
	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	130.977.200	85.711.500	65.44 %
F	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	159.604.500	147.476.925	92.40 %
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	159.604.500	147.476.925	92.40 %
	Sub Kegiatan Pengolahan ,Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan	159.604.500	147.476.925	92.40 %

	dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
	Sasaran 3 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	7.965.097.453,31	6.943.130.252	87.17 %
G	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	7.965.097.453,31	6.943.130.252	87.17 %
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.812.769	100.179.334	99.37 %
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.113.600	84.496.334	99.27
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.699.169	15.683.000	99.90 %
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.877.383.739	4.007.652.534	82.17 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.501.022.079	3.674.651.160	81.64 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	372.269.660	328.930.874	88.36 %
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.485.000	1.468.500	98.89 %
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.607.000	2.602.000	99.81 %
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66.976.000	66.576.000	99.40 %

	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	976.000	966.000	98.98 %
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	66.000.000	65.610.000	99.41 %
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	440.898.568	411.686.377	93.37 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000	39.987.100	99.97 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.830.080	126.742.936	87.51 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.613.488	98.404.000	99.79 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.500.000	58.915.750	92.78 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	10.455.000	9.226.900	88.25 %
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	19.493.941	97.47 %
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.375.185.500	1.264.682.040	91.96 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.120.000	5.117.800	99.96 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	604.000.000	560.633.478	92.82 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	766.065.500	698.930.762	91.24 %

6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1.167.340.877,31	1.151.269.717	98.62 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	182.350.810	173.122.785	94.94 %
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	386.747.920	382.797.250	98.98 %
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	598.242.147,31	595.349.682	99.52 %
	TOTAL	9.551.256.391,81	8.459.224.899,00	88,57 %

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Tuban Tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

2.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tuban Tahun 2025 merupakan wujud nyata pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan instansi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Secara umum, pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2025 menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat baik. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta analisis kinerja berdasarkan sasaran strategis menunjukkan bahwa sebagian besar target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja telah tercapai, bahkan melampaui target.

1. Keberhasilan Kinerja

Indikator yang berhasil mencapai dan melampaui target antara lain:

- Indeks Pelayanan Publik (IPP)
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- Realisasi Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
- Persentase Calon Investor yang Menanamkan Modal.
- Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan
- Persentase Ketersediaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Keberhasilan tersebut didorong oleh penggunaan sistem perizinan elektronik (OSS), komitmen tinggi dari pimpinan, serta koordinasi yang solid antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun demikian, masih terdapat kendala seperti belum terealisasinya investasi dari sejumlah Perusahaan Asing di Kabupaten Tuban serta masih rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai urgensi kepemilikan NIB.

2.2 REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan capaian kinerja pada tahun anggaran mendatang, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. **Penguatan Strategi Peningkatan Realisasi Investasi:** Meningkatkan promosi potensi daerah secara lebih terarah dan berbasis sektor unggulan.
2. **Penguatan Kapasitas SDM:** Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala mengenai sistem OSS bagi aparatur pengelola perizinan guna menjamin pelayanan yang cepat dan akurat.
3. **Pemetaan Potensi Investasi:** Menyusun Peta Potensi per sektor dan peluang investasi yang komprehensif sebagai materi utama dalam pameran investasi dan forum bisnis untuk menarik minat investor secara lebih efektif.
4. **Pendampingan Pelaku Usaha:** Meningkatkan intensitas pendampingan langsung bagi pemohon perizinan, khususnya pelaku UMKM, guna mempermudah akses legalitas usaha dan pemenuhan komitmen perizinan.

Melalui komitmen pelaksanaan rekomendasi ini, diharapkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan investasi yang inklusif, yang pada akhirnya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Tuban.

Tuban, 26 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TUBAN



Dra. ESTI SURAHMI, Apt

Pembina Tk. I

NIP. 19660808 199302 2 004